

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap bangsa di dunia memiliki hak yaitu mendapatkan kemerdekaan, seperti didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pembukaan alinea pertama “ *Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...*”. Salah satunya bangsa Indonesia yang merupakan salah satu bangsa yang ada di dunia dengan berbagai percobaan yang dihadapi seperti masalah politik, ekonomi, hingga masalah keamanan dan bangsa Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kemerdekaan atas semua percobaan. Salah satunya masalah pembangunan politik di Indonesia.

Tidak hanya itu saja, bangsa Indonesia juga memiliki hak untuk mendapatkan suatu bentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mendapatkan suatu bentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, bangsa Indonesia mengalami percobaan mengenai suatu bentuk sistem pemerintahan .

Sistem pemerintahan Indonesia banyak mengalami perubahan. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia yaitu setelah Indonesia merdeka terbentuklah pemerintahan yang berdaulat dengan landasan UUD 1945 dibentuklah sistem pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh satu orang wakil Presiden serta para menteri-menteri. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saat diawal kemerdekaan Indonesia yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. Namun kenyataannya, saat itu belum dapat dijalankan secara murni terlihat pada aturan peralihan UUD 1945 Pasal IV yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI yang saat itu MPR, DPR, DPA, BPK,

MA belum terbentuk, sehingga segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Kemudian dalam kongres Komite Nasional Indonesia pada tanggal 16 Oktober 1945 di Malang, wakil Presiden Moh Hatta mengeluarkan Maklumat X dan sejak dikeluarkan Maklumat X ini dikeluarkan kepada KNIP diberi wewenang untuk turut membuat undang-undang dan menetapkan GBHN. Jadi, seolah-olah memegang sebagian kekuasaan MPR. Kemudian pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkannya Maklumat Pemerintah yang mana anjuran untuk mendirikan partai-partai politik sehingga pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet parlementer pertama yang saat itu dibawah pimpinan Sutan Syarir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itu sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer sekaligus berlakunya sistem multi partai, walaupun tidak dikenal dalam UUD 1945. Oleh karena itu sebagian orang berpendapat bahwa perubahan sistem pemerintahan dan administrasi negara merupakan tindakan yang menyalahi UUD 1945 yang menjadi anutan. Pada saat diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer maka tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah dibawah di tangan menteri, tetapi apabila kebijaksanaan menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri(kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Negara Indonesia telah melaksanakan beberapa sistem kabinet. Kabinet yang telah dilaksanakan diantaranya kabinet Presidensial (pertama) pada tahun 1945, selanjutnya berganti menjadi kabinet Parlementer yang awalnya di pimpin oleh Kabinet Syarir, kemudian pada tahun 1948 Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, selanjutnya kabinet darurat (1949), kabinet Susanto, yaitu Kabinet Peralihan 1950 hingga akhirnya kembali menjadi kabinet Parlementer pada tahun 1950-1959, yang mana mengalami beberapa pergantian kabinet hingga 7 kali pergantian.

Pada bulan September 1950, dimulainya kembali sistem pemerintahan Parlementer yang dipimpin oleh kabinet Natsir. Namun, kabinet ini mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan oleh kurangnya dukungan rakyat secara menyeluruh, kabinet Natsir belum berhasil melaksanakan Pemilihan Umum yang telah menjadi programnya, dan kabinet Natsir belum mampu mengembalikan Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia. Kemudian digantikan oleh kabinet Sukiman, namun kabinet ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan oleh adanya pertentangan pribadi terutama antara pemimpin yang sifatnya pribadi antar individu, dibawa-bawa kedalam organisasi sehingga organisasilah yang menjadi korban dan berantakan dan saling menjatuhkan pihak lainnya walaupun separtai. Selanjutnya digantikan oleh kabinet Wilopo akan tetapi kabinet ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet sendiri, keretakan dan kekurangkompakanserta perselisihan antara partai-partai pendukung kabinet, serta adanya mosi tidak percaya dari parlemen.

Kemudian, digantikan oleh Kabinet Ali I, kabinet ini pun demikian juga, mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan oleh peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955 sehingga digantikan oleh Kabinet **Burhanuddin Harahap**.

Dari ketujuh kabinet, Kabinet Burhanuddin Harahap dapat dikatakan kabinet terbaik selama 7 kali pergantian kabinet karena program-program yang dirancang oleh kabinet Burhanudin Harahap hampir seluruhnya terlaksana dengan baik, terutama pada saat Pemilihan Umum.

Boerhanoedin Harahap menjabat sebagai Perdana Menteri hanya 8 bulan saja. Walaupun hanya beberapa bulan saja, Boerhanoedin Harahap berhasil dalam berbagai program yang telah dirancang oleh kabinet yang beliau pimpin. Salah satunya adalah terlaksananya Pemilihan Umum, kembalinya wibawa pemerintah terhadap KSAD. Walau masa jabatan hanya beberapa bulan saja namun kabinet ini berusaha supaya dalam melakoni

perannya sebagai penyelenggara pemerintah dapat terlaksana dan membuahkan hasil. Boerhanoedin Harahap dikenal sebagai tokoh yang pekerja keras. Tidak hanya itu saja beliau dikenal orang yang dapat dipercaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *“Peranan Burhanuddin Harahap pada masa Demokrasi Liberal(tahun 1955-1956)”* sebab masih terbatas pengetahuan khalayak ramai mengenai peranan Burhanuddin Harahap pada masa Demorasi Liberal terkhusus generasi penerus bangsa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengungkapkan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Konstalasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal(1950-1955)
2. Program yang rancang pada masa kabinet Burhanuddin Harahap
3. Peranan Burhanuddin Harahap pada masa Demokrasi Liberal(tahun 1955-1956) dari segi :
 - a. Politik
 - b. Ekonomi
 - c. Militer/pertahanan

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konstelasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal(1950-1955)?
2. Program apa saja yang dirancang oleh Kabinet Burhanuddin Harahap?
3. Bagaimana peranan Burhanuddin Harahap pada masa Demokrasi Liberal(tahun 1955-1956) baik dibidang:

- a. politik,
- b. ekonomi dan
- c. militer/pertahanan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

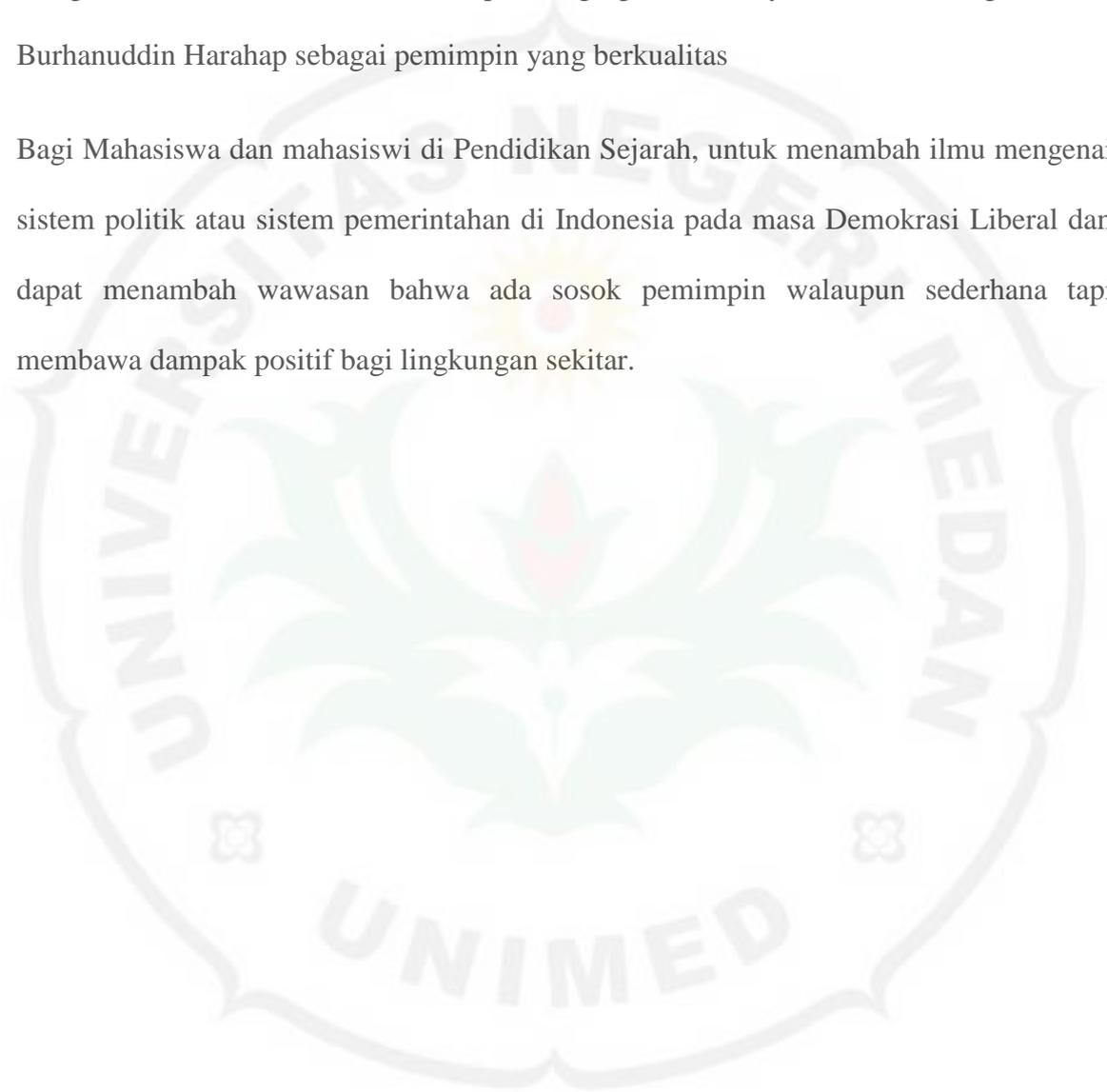
1. Untuk mengetahui konstalasi politik Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1955)
2. Untuk mengetahui program yang dirancang oleh kabinet Burhanuddin Harahap
3. Untuk mengetahui peranan Burhanuddin Harahap pada masa Demokrasi Liberal(tahun 1955-1956) baik dibidang:
 - a. politik,
 - b. ekonomi, dan
 - c. militer/ pertahanan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sumber bagi peneliti yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Dapat melatih peneliti untuk membuat karya ilmiah dalam penelitian sejarah yang berkualitas.
3. Untuk memperkaya informasi dan wawasan baik Civitas Akademika UNIMED maupun masyarakat tentang Peranan Burhanuddin Harahap pada masa Demokrasi Liberal(1955-1956)
4. Bagi Akademisi Pendidikan Sejarah, sebagai bahan ataupun data penting yang dapat menambah pengetahuan, mengingat masih sangat sedikit yang mengetahui mengenai Burhanuddin Harahap

5. Bagi Pemerintah, supaya menjadi bahan yang mendukung untuk membuat literatur mengenai Mr. Burhanuddin Harahap, mengingat minimnya literatur mengenai Mr. Burhanuddin Harahap sebagai pemimpin yang berkualitas
6. Bagi Mahasiswa dan mahasiswi di Pendidikan Sejarah, untuk menambah ilmu mengenai sistem politik atau sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan dapat menambah wawasan bahwa ada sosok pemimpin walaupun sederhana tapi membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.



THE
Character Building
UNIVERSITY